

DAFTAR REFERENSI

1. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2004.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Vol. 22, Republik Indonesia. 2010. p. 178–89.
3. Mardiasmo. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. 2002. 334 p.
4. Indonesia PR. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia; 2006.
5. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Indonesia; 2000.
6. Ferdian Y. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah. 2013;
7. Eko YA. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sahterhadap belanja daerah di kota balikpapan. 2016.
8. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Indonesia; 2000.
9. Icuk Rangga Bawono MN. Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD. 2012. 150 p.
10. Indonesia PR. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. p. 285–7.
11. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia; 2015.
12. Kaltaraprov H. APBD 2018 Naik 2,7 Persen dari Tahun Lalu. humas.kaltaraprov.go.id. 2017.
13. Arifin MZ. Defisit Terjadi di APBD Kota Semarang Tahun 2017, Ketua DPRD Ingin Pemkot Lakukan Ini. *Tribun Jateng*. 2017.
14. Noor Aspasia Hasibuan. Belanja Daerah Rendah, JK Minta Tiga Menteri Menghadap. *CNN Indonesia*. 2015.
15. Indriani D. Bupati Wihaji Serahkan Ranperda Laporan Pelaksanaan APBD 2017, Ini Detailnya. *Tribun Jateng*. 2018.
16. Rinaldi U. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Volume 8 Nomor 2. 2012.
17. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia; 2005.
18. Siahaan MP. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2005. 472 p.
19. Halim A. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat; 2007.
20. Indonesia PR. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.

21. Mardiasmo. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Jakarta: Andi; 2004.
22. Wulansari DT. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect. 2015;1–16.
23. Widyastuti JU dan S. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014. 2017;1.
24. Ghozali I. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2018.
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kabupaten Batang